

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini semakin pesat, yang dulunya semua urusan bidang ekonomi, politik, sosial budaya, militer diatur oleh Pemerintah Pusat maka untuk sekarang sudah berubah yaitu Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri yang sering disebut dengan sistem Otonomi Daerah. Sistem otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan-urusan dibidang memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola keuangan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerahnya, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut di atas didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Pada era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Seyogyanya dengan kejelasan pembagian urusan antara Pusat

dan Daerah, dihitung besarnya beban pengeluaran dari masing-masing tingkat pemerintahan. Secara teoritis, hal ini dapat dihitung apabila untuk setiap urusan pemerintahan tersebut, baik yang masih di Pusat maupun yang telah di Daerahkan, dapat dihitung standar biayanya. Tetapi ketentuan tentang Standar Biaya ini paling tidak berlaku secara nasional, hingga hari ini belumlah di buat. Dengan demikian, secara teoritis, desentralisasi ini belum memiliki perhitungan yang valid. Implikasinya, dalam menetapkan besarnya uang yang harus di daerahkan dalam rangka pembiayaan beban pengeluaran ini pun dilakukan tanpa memperhitungkan ukuran beban pembiayaan yang telah akurat tersebut. Berbagai jenis dana transfer, khususnya DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakan dana transfer terbesar. Pada akhirnya dialokasikan dengan menggunakan variabel-variabel yang diperkirakan dapat “mewakili (memprestasikan) kebutuhan fiskal” suatu daerah.

Anggaran merupakan instrumen penting didalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di organisasi sektor publik termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Penyusunan anggaran yang disampaikan masing-masing SKPD dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas terutama tentang tujuan, sasaran, serta disusun berdasarkan prestasi kerja.

Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai dari penyusunan strategi dan perencanaan strategik yang telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Peranan anggaran dalam perencanaan dicapai dengan menyatakan dalam nilai uang besarnya input yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Sementara peranan anggaran dalam pengendalian dapat dicapai dengan mempersiapkan anggaran dengan cara yang dapat menunjukan input dan sumber daya yang telah

dialokasikan kepada individu atau departemen sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA-SKPD. Dalam RKA-SKPD, masing-masing SKPD telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA telah memuat masukan, keluaran dan hasil dari masing-masing program dan kegiatan, jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk guna menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dalam hal ini berusaha menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan perkembangan dalam penyusunan anggaran tetapi dengan tidak mengabaikan pengukuran kinerja anggaran baik secara mikro dan makro serta pengukuran kinerja anggaran standar biaya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas **“Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan”** dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk menghasilkan suatu penulisan yang baik, pembatasan terhadap ruang lingkup perlu dilakukan. Pembatasan Tugas Akhir ini dibatasi pada proses penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan yang meliputi sebagai berikut:

1. Proses teknis dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.
2. Proses penginputan Rencana Kerja dan Anggaran pada Aplikasi Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi masalah yang timbul dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini, memiliki tujuan dan kegunaan bagi penulis, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan maupun para pembaca laporan ini. Berikut akan diuraikan tujuan dan kegunaan penulisan ini.

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.
- b. Untuk mengetahui Proses Penginputan Rencana Kerja dan Anggaran Pada Aplikasi Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dalam penyusunan anggaran.
- d. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penyusunan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan-tahapan dalam penyusunan

rencana kegiatan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang berguna sebagai bekal agar kelak dapat menerapkan metode yang tepat antara teori dan praktek dalam dunia kerja.

2. Bagi Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Hasil penulisan ini dapat meningkatkan kualitas kelulusan serta memberikan tambahan informasi yang dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya.

3. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan

Sebagai sarana informasi atau masukan yang dapat digunakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan sebagai bahan pertimbangan menyempurnakan proses penyusunan rencana anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang telah dilaksanakan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang penting bagi penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Data tersebut hendaknya berhubungan dengan pokok bahasan yang akan penulis sampaikan dalam penulisan tugas akhir. Untuk mendapatkan data tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.4.1 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama (Jonathan Sarwono, 2006:129). Data ini diperoleh dari narasumber, yaitu orang yang kita jadikan sarana mendapatkan informasi atau data yang kita butuhkan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan (Jonathan Sarwono, 2007:123). Sehubungan dengan judul penulisan tugas akhir, data sekunder berupa peraturan-peraturan penyusunan APBD, petunjuk teknis penyusunan RKA dan buku-buku yang berhubungan dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang di pakai untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder, baik melalui proses wawancara, studi pustaka maupun observasi dan sebagainya. Metode tersebut antara lain:

a. Metode Observasi

Menurut (Sarwono, 2007:175), metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Di dalam penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan pengamatan secara langsung tentang penyusunan rencana kegiatan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan, yaitu pada Bidang Anggaran.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam (Sarwono, 2007:178). Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam penyusunan Rencana kegiatan Anggaran , dan yang menjadi narasumber atas metode ini yaitu Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer dan staf bidang anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan yang diperoleh adalah penjelasan secara teknis mengenai proses perencanaan penganggaran.

c. Metode Studi Kepustakaan

Menurut Sarwono (2001: 166), menyatakan bahwa studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca atau memanfaatkan buku-buku untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan pendapat ahli dengan menempatkan kesimpulan tersebut sebagai metode tersendiri untuk merumuskan sesuatu pendapat baru yang berikutnya lebih menekankan pengutipan-pengutipan untuk memperkuat uraian. Dalam metode ini data dikumpulkan dengan menggunakan buku-buku literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem pengeluaran kas serta sumber-sumber yang diperoleh dari perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas

Diponegoro, perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan perpustakaan Daerah Kota Balikpapan.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun menjadi empat bagian yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan, yang meliputi beberapa hal yang melatarbelakangi sejarah berdirinya, lokasi perusahaan, visi dan misi. Selain itu pembahasan tentang struktur dan susunan organisasi, uraian tugas masing-masing bidang dan hal-hal yang berkaitan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini dilakukan pembahasan tentang ruang lingkup penulisan mengenai Pengertian Rencana Kerja dan Anggaran, Proses teknis dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan, Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan anggaran dan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir masalah yang timbul dalam penyusunan RKA.

BAB IV PENUTUP

Merupakan ringkasan dari pembahasan yang dimuat dalam Bab III tentang proses Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.